

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI  
KAMPUNG KB KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

Yanuar Sukmahandika

NPP. 31.0501

*Asdaf Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

*Program Studi*

*Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: [yanuarsukmahandika@gmail.com](mailto:yanuarsukmahandika@gmail.com)

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** (Contains the background behind the research). The author focuses on the problem of not achieving the target number of family planning acceptors in several family planning villages in Banguntapan District. **Purpose:** The aim of this research is to evaluate the implementation of the program, explain the inhibiting and driving factors, and describe the efforts made to overcome obstacles to the implementation of the family planning program in the KB village, Banguntapan District, Bantul Regency. **Method:** This research uses qualitative descriptive methods and evaluation theory according to Nurcholis (2007). Data collection techniques include semi-structured interviews, participant observation and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that the implementation of the family planning program in KB Village, Banguntapan District, Bantul Regency has been carried out well, but its implementation is still not optimal and there are several shortcomings. **Conclusion:** The conclusion from this research is that there are still several obstacles such as: Limited budget from the government, there are still several communities that have not been served by family planning programs, lack of quality, quantity and capacity of cadres, inadequate facilities and infrastructure. Meanwhile, the driving factors include: Community participation in activities is quite good, community concern for self-help, there are several companies that are willing to provide donations or CSR for KB village activities. Efforts made to overcome these obstacles include: Establishing collaboration with PT or local companies, carrying out training for cadres, improving facilities and infrastructure, conducting outreach to the community.

**Keywords:** Evaluation, Family Planning, KB' Village

**ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan belum tercapainya target jumlah akseptor KB di beberapa Kampung KB di Kecamatan Banguntapan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendorong, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan program keluarga berencana di kampung kb Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori evaluasi menurut Nurcholis (2007). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi

terstruktur, observasi secara partisipatif dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih belum maksimal dan terdapat beberapa kekurangan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa hambatan seperti: Terbatasnya anggaran dari pemerintah, masih ada beberapa masyarakat yang belum terlayani program KB, kurangnya kualitas, kuantitas, dan kapasitas kader, sarana dan prasarana yang kurang. Sedangkan faktor pendorongnya antara lain : Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang cukup baik, kepedulian masyarakat untuk melakukan swadaya, ada beberapa perusahaan yang mau memberikan sumbangan atau CSR untuk kegiatan kampung KB. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: Mengadakan kerjasama dengan PT atau perusahaan setempat, melaksanakan pelatihan bagi kader, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Evaluasi; Keluarga Berencana; Kampung KB

## **I. PENDAHULUAN (15-20%)**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk besar di dunia. Dilansir dari Badan Pusat Statistika Nasional, jumlah penduduk di Indonesia yakni 278 696,2 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tentu saja menimbulkan masalah. Secara garis besar masalah kependudukan yang dialami Indonesia jika dilihat dari segi tingginya pertumbuhan penduduk yaitu, Meningkatnya jumlah kemiskinan, rendahnya kesempatan pendidikan, Persaingan dalam memperoleh sumber daya alam, Menurunnya kualitas lingkungan (Hutasoit, 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan sensus terakhir tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 270.203.917 jiwa. Jumlah penduduk ini masih akan terus meningkat setiap tahunnya (BPS, 2020).

Khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di DIY sebanyak 3,67 juta jiwa. Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta meningkat dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya, Pada tahun 2010 sampai tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini bertambah sebanyak 211,23 ribu orang setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,58 persen per tahun.

Kepadatan penduduk ini harus diimbangi dengan kualitas penduduk untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik, yang meliputi derajat kesehatan, kebugaran, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial dan ekonomi, ketaqwaan, kepribadian, kebangsaan, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, yang menjadi ukuran kondisi penduduk sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan berkelanjutan. (Gatiningsih & E, 2017)

Untuk mengatasi permasalahan dan peningkatan kualitas penduduk tersebut, pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Program KB ini telah dimulai di Indonesia sejak masa Orde Baru (1971) dan terbukti mampu menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Akan tetapi ada penambahan sekitar 3 hingga 3,5 juta penduduk setiap tahun. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang disusun oleh Badan Pusat Statistik terakhir, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai 273,2 juta jiwa. Untuk melangoptimalkan program keluarga berencana, berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pemerintah membentuk Kampung KB sebagai penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Harapannya, dengan adanya pembentukan atau pencanangan Kampung KB ini dapat menjadi salah satu inovasi strategis yang mampu mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK.

Pada awalnya program Kampung KB mengambil frasa kampung Keluarga Berencana yang mempunyai pengertian satuan wilayah setingkat RW, Dusun, atau yang setara dengan kriteria tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Akan tetapi perkembangannya seiring dengan perubahan lingkungan strategis serta dinamika yang menyertai pelaksanaan program, maka ke depan Kampung Keluarga Berencana diganti frasanya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan lokus wilayah setingkat desa sebagai perluasan jangkauan program serta dampak yang diinginkan dan salah satu prinsipnya yaitu membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB (Ma'ruf & Andayani, 2022).

Di Kabupaten Bantul sendiri telah melaksanakan program kampung KB dengan dasar peraturan pemerintah kabupaten bantul nomor 99 tahun 2019 tentang kampung keluarga berencana. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 2019, akan tetapi pelaksanaannya program Keluarga Berencana di Kampung KB Kabupaten Bantul masih belum sesuai harapan. Hal ini dilihat dari data peserta KB sebagai salah satu prinsip dan aspek capaian program Kampung KB yang belum memenuhi target. Kecamatan Banguntapan menjadi kecamatan terendah dalam keikutsertaan program keluarga berencana dengan memiliki capaian target yaitu 10,04%. Sedangkan untuk capaian target tertinggi ada pada kecamatan bambanglipuro yaitu 121,75%. Kecamatan pajangan menjadi kecamatan dengan jumlah peserta KB terbanyak yaitu 895 keluarga. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dengan studi kasus Kampung KB di Kecamatan Banguntapan yang mana memiliki persentase capaian target paling rendah dibanding kecamatan lain.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan. Salah satunya yaitu Kecamatan Banguntapan menjadi kecamatan terendah dalam keikutsertaan program keluarga berencana dengan memiliki capaian target yaitu 10,04% (DP3AP2KB Bantul, 2022). Dalam buku modul kampung KB Tahun 2022 Keikutsertaan program keluarga berencana tersebut merupakan tugas dari salah satu seksi di Kampung KB. Seksi tersebut yaitu seksi advokasi dan KIE perubahan perilaku. Dalam seksi tersebut memiliki kegiatan pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Kegiatan tersebut berisi memotivasi PUS untuk ber-KB, membina keanggotaan ber-KB, membuat peta keluarga tiap RT, mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja, pembentukan PIK Remaja dan kampanye PUP (Ma'ruf & Andayani, 2022)

Rendahnya keikutsertaan dalam program keluarga berencana ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini sejalan dengan data bahwa Kabupaten bantul memiliki jumlah penduduk yang cukup fantastis dan menempati urutan kedua. Menurut Badan Pusat Statistik Yogyakarta, kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk mencapai 1.064.286 jiwa pada tahun 2023 dengan Kecamatan Banguntapan menjadi daerah di posisi pertama paling ramai di Kabupaten Bantul. Kepadatan penduduknya mencapai angka 4.460,29 jiwa per km persegi. Jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduknya yang sebanyak 127.029 jiwa dan luas wilayahnya yang sebesar 28,48 km persegi. (Radarjogja.com,2023) Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan tentu akan menyebabkan berbagai permasalahan. Secara garis besar masalah kependudukan jika dilihat dari segi tingginya pertumbuhan penduduk yaitu, meningkatnya jumlah kemiskinan, rendahnya kesempatan pendidikan, persaingan dalam memperoleh sumber daya alam, menurunnya kualitas lingkungan (Zutha, 2017).

Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam implementasi pelaksanaan program dua anak, diantaranya adalah, Menurut Tatuhe, dkk (2016:4) Dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menunggu instruksi dalam pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat,

sedangkan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan kependudukan dalam program Keluarga Berencana disuatu daerah. Menurut Dewi (2016:101) Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa “Banyak anak banyak rezeki” sehingga banyak masyarakat yang masih mempercayainya terutama bagi masyarakat awam. Mereka beranggapan bahwa nasib seluruh anak-anak mereka akan dijamin kehidupannya oleh Tuhan, padahal mereka tetap harus berusaha dan bekerja keras agar dapat hidup sejahtera.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Afandi, Ahmad berjudul *Efektivitas Pembentukan Kampung Kb Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Susukan*, menemukan bahwa program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Susukan sudah efektif mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun belum optimal (Afandi, A, 2022). Penelitian Alfaris (2023), menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan khususnya pada infrastruktur yang berdampak pada petani selain itu, program ini masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor (Al Fariz, 2023). Berdasarkan penelitian Andhiki, Syahra Sonia Dkk (2020) mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Kampung Kb Kabupaten Studi Kasus Kecamatan, penulis menemukan ada beberapa alasan mengapa pencapaian metode kotrasepsi jangka panjang tidak mencapai tujuannya. Alasan-alasan tersebut meliputi kurangnya petugas lapangan, dukungan pendanaan operasional yang buruk, kebijakan yang tidak beroperasi, situasi pandemi yang menyebabkan pembatasan atau penghentian aktivitas, dan faktor-faktor sosial budaya yang signifikan (Andhiki, Syahra Sonia Dkk, 2020). Selanjutnya penelitian oleh Febrian, Deni Topan (2022) Program kampung KB telah berhasil diimplementasikan tetapi ada beberapa kekurangan, terutama dalam hal fasilitas dan petugas yang sudah ada. Selain itu, program ini masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan kerjasama antar sektor (Febrian, Deni Topan, 2022). Penelitian oleh Resnawaty, Risna (2021) menunjukkan adanya perubahan Kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Namun perubahan tersebut masih lambat dan kurang signifikan. Salah satu penyebabnya yaitu adanya kekurangan sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana. (Resnawaty, R, 2021) Penelitian oleh Romi, S dan Lina, ME (2019) dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan dua konsep urban city dan konsep akulturasi ini, mendapatkan hasil bahwa pengaruh kampung KB tidak terlalu dominan dalam laju pertumbuhan penduduk akan tetapi terdapat faktor lain yang berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani (2018) yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini diperoleh hasil bahwa pengimplementasian program kampung KB masih belum berjalan dengan baik sesuai target terlihat dari indikator-indikator yang diteliti yakni sumberdaya disposisi implementator dan hubungan antar organisasi. penelitian oleh Tiara Anggraini (2019) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (dengan studi kasus di Kota Pekanbaru) menggunakan Metode deskriptif pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkns bshwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru masih sangat kurang,dibuktikan dari kurangnya komitmen khususnya dari aparat setempat memberikan pelayanan yang maksimal serta sosialisasi program kepada masyarakat agar dapat dipahami perencanaan KB di desa secara keseluruhan. Penelitian oleh Tesalonika

Syela Maleke, Masje Pangkey, Deysi Tampongangoy (2022) dengan judul penelitian Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan yang menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Efektivitas program kampung KB di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan 3 indikator yang diperoleh yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi bahwa sudah berjalan secara efektif, walaupun masih ada beberapa kendala atau masalah. Penelitian dari Sutarni (2020) berjudul Efektivitas Program Kampung Kb (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Dusun Borong Ampirie Desa Kalobbake Camatan Tellulimpoe Metode Ex post facto pendekatan kuantitatif Penelitian yang dilakukan diketahui bahwa program kampung KB efektif dalam membentuk Keluarga Sejahtera pada Masyarakat Dusun Borong Ampirie Desa Kalobba Kecamatan Telulimpoe dengan besar efektivitas 0,102 atau sebesar 10.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana di kampung KB teori yang digunakan adalah teori evaluasi menurut Nurcholis (2007) berbeda dengan penelitian oleh Afandi, A (2022), Sutarni (2020), Tesalonika, SM, dkk (2022), Tiara, A (2019), yang menggunakan teori efektivitas dalam penelitiannya begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrian, Deni Topan (2022), Desi Ariani (2018), Romi, S dan Lina, ME (2019), yang mana menggunakan teori implementasi. Penelitian ini memiliki kesamaan teori evaluasi dengan penelitian oleh Purba, Al Fariz (2023), Andhiki, Syahra Sonia Dkk (2020), Resnawaty, Risna (2021). Akan tetapi, memiliki sejumlah perbedaan yang menunjukkan kebaruan. Perbedaan tersebut antara lain, batasan masalah dan lokasi yang menjadi fokus penelitian bahwa penelitian ini memiliki lokus Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan fokus masalah pelaksanaan program keluarga berencana yang terdapat pada Kampung KB.

#### **1.5. Tujuan.**

Mengetahui dan menganalisis evaluasi, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggambarkan sudut pandang responden kemudian menggunakan kata-kata yang menjelaskan perilaku responden untuk mengevaluasi, mereduksi, melakukan triangulasi, menyimpulkan, dan memverifikasi data (Husaini dan Purnomo, 2009).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi secara partisipatif dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang, Kepala subbagian Pengendalian Penduduk, Staf subbagian Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Bantul, Camat Kecamatan Banguntapan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Peserta Program KB di kampung KB kecamatan banguntapan berjumlah 5 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh Hanif Nurcholis (Nurcholis, 2007) yang menyatakan bahwa evaluasi meliputi faktor *Input, Process, Output, Outcomes*.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis mengevaluasi pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan pendapat dari Nurcholis (2007) yang menyatakan bahwa evaluasi memiliki empat indikator yaitu *Input, Process, Output, Outcomes*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Input**

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Nurcholis (2007: 277-278) Input merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh kampung KB. Sebagaimana Kampung KB Kecamatan Banguntapan dalam melaksanakan berbagai aktivitas memiliki aspek input yang terdiri dari Sumberdaya Manusia, Pendanaan, Program dan Kegiatan, Sarana dan prasarana, serta modal sosial masyarakat. Sumberdaya manusia yang menjadi penggerak program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan terdiri dari PLKB (penyuluh lapangan yang ditugaskan oleh BKKBN), Kepala Dusun, Kader kader, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat.

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ditugaskan di banguntapan berjumlah lima orang yang diketuai oleh Ibu Asih. PLKB bertanggung jawab dalam satu Kecamatan Banguntapan dengan kampung KB yang berjumlah delapan. Selanjutnya yaitu kader. Kader dalam kampung KB terbagi atas 6 kelompok. Yaitu Kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan Sekretariat. Kader bertugas untuk berperan aktif dalam kegiatan kampung KB itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asih selaku ketua PLKB Banguntapan, beliau menyampaikan bahwa kader dibentuk melalui musyawarah. Peningkatan kapasitas kader juga dilaksanakan akan tetapi tidak secara rutin, hal ini karena dana yang terbatas dan tidak ada dana khusus untuk peningkatan kapasitas kader. Jika dilihat dari masyarakatnya, Berdasarkan observasi, respon masyarakat terhadap berbagai program dan kegiatan yang ada pada dasarnya baik. Penulis mengambil sample pada salah satu kampung KB terbaik se-DIY tahun 2022 yaitu Dusun Potorono. Setelah melakukan wawancara kepada Ibu Atik pada 17 Januari tahun 2024 sebagai kepala dusun sekaligus kepala kampung KB menyatakan bahwa masyarakat sangat berantusias pada seluruh kegiatan. Sebagai pembandingan, penulis juga melaksanakan wawancara dengan kampung KB Plumbon sebagai kampung KB dengan peringkat bawah. Bu Ida sebagai ketua menyatakan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang terutama peran bapak hal ini karena disibukkan oleh kegiatan dan pekerjaan masing-masing (18/01/2024).

Pendanaan Kampung KB Kecamatan banguntapan bersumber dari DAK BOKB (Dana Alokasi Khusus Belanja Operasional Keluarga Berencana) dari BKKBN, Swadaya, Dana desa, dan CSR (investor atau sponsor). Waktu penululul mewawancarai Ibu Atik di Dusun Potorono pada tanggal 17 Januari 2024, beliau menjelaskan “Untuk pendanaan kegiatan kampung KB, berasal dari BOKB. Ada juga beberapa kelurahan yang menganggarkan dari Dana desa. Termasuk untuk sarana dan prasarana berasal dari swadaya dan dana desa tadi. Akan tetapi, sebagian besar dana diperoleh dari CSR dan swadaya masyarakat desa itu sendiri.

### **3.2. Proses**

Berdasar teori yang dikemukakan Nurcholis (2007), Proses adalah kebijakan yang diformulasikan langsung yang memiliki bentuk berupa pelayanan kepada masyarakat. Indikator pada ini meliputi :

- a. Ketepatan sasaran
- b. Ketepatan guna
- c. Efisiensi

Menurut Ibu Asih selaku Koordinator PLKB, beliau menyampaikan, “Dulu waktu pencanangan kampung KB didasarkan pada capaian KB yang masih rendah, kampung kumuh, dll pada awalnya. Kemudian seiring berkembangnya waktu sekarang ini seluruh kelurahan harus ada kampung KB

setingkat Kalurahan, tapi ada juga yang masih setingkat dusun. Karena pada awalnya setingkat dusun. Olehkarena itu, setiap ada kegiatan harus diinput di website dalam ruang lingkup kalurahan.” Sasaran warga kampung KB yaitu seluruh usia masyarakat. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, manula, ibu hamil. Ibu asih juga menambahkan bahwa menurutnya pembentukan kampung KB ini telah tepat sasaran terkhususnya dalam peningkatan peserta KB dan pemantauan peserta KB.

Dalam hal ini ketepatan guna, Kampung KB telah menjawab kebutuhan dan persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu kampung KB juga telah memenuhi fungsinya sebagai pengoptimalan program keluarga berencana. Dalam wawancara oleh penulis, camat Kecamatan Banguntapan menyatakan, “Adanya program kampung KB, terlepas dari segala kekurangannya telah menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat. Dalam program kampung KB terdapat kegiatan tribina yang memerhatikan Balita, Remaja, dan Lansia. Hal itu tentu saja diperlukan masyarakat karena pada dasarnya msyarakat memerlukan edukasi dan wadah untuk bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalahnya (08/01/2024 kantor kecamatan banguntapan)”

Dalam hal efisiensi, kampung KB dinilai cukup efisien dalam menjalankan programnya. Berdasarkan observasi, kampung KB dinilai efisien karena keluarga yang memang berpotensi dan membutuhkan edukasi dan pelayanan keluarga berencana telah di petakan atau telah didata oleh para kader kampung KB. Hal ini membuat sosialisasi dan edukasi dapat dilaksanakan secara lebih intens dan tepat sasaran dari rumah ke rumah.

### 3.3. Output

Output atau keluaran dari program Kampung KB ini adalah dalam konteks hasil yang dihasilkan dari Program Kampung KB seperti Pendataan Keluarga yang merupakan dasar utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kampung KB, kemudian capain peserta KB yang merupakan salah satu sasaran dari Program Keluarga Berencana. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam Program KB, kemudian partisipasi dari berbagai kelompok kegiatan yang di khususkan padakeikutsertaan program kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan Kegiatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

**Tabel 3.1 Jumlah Sasaran Kegiatan Kampung KB**

No	Kelurahan	Pasangan Usia Subur		Sasaran		
		Bukan Peserta KB	Total	BKB	BKL	BKR
1.	Potorono	607	2270	168	32	35
2.	Jambidan	514	1782	143	42	98
3.	Wirokerten	807	2503	325	43	65
4.	Baturetno	450	2387	107	47	56
5.	Jagalan	96	345	50	34	38
6.	Singosaren	169	597	104	25	23
7.	Tamanan	440	1814	229	31	25
8.	Banguntapan	1104	4269	201	37	117
<b>TOTAL</b>		<b>4187</b>	<b>15.967</b>	<b>1327</b>	<b>291</b>	<b>457</b>

Sumber: laporan bulanan tingkat kelurahan di banguntapan desember 2023

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditarik kesimpulan, kelurahan banguntapan pasangan usia subur terbanyak dibanding dengan kelurahan lainnya. Sedangkan kelurahan Jagalan memiliki pasangan usia subur paling sedikit. Jika dilihat dari jumlah pasangan usia subur yang bukan peserta KB dengan total pasangan usia subur, maka Kelurahan Wirokerten memiliki jumlah tertinggi yaitu 807 pasangan Bukan peserta KB. Kemudian Kelurahan Jagalan menjadi kelurahan terendah yaitu 96 pasangan. Jika dilihat dari sasaran TriBina atau BKB, BKL, dan BKR maka wirokerten memiliki partisipasi Bina Keluarga

Balita paling tinggi yaitu 325 dan terendah berada di kelurahan Jagalan yang berjumlah 50. BKL atau bina keluarga lansia paling banyak berada di Kalurahan Baturetno dan terendah di Kalurahan Singosaren. Sedangkan untuk Bina Keluarga Remaja atau BKR tertinggi pada Kelurahan Banguntapan dan terendah di Kalurahan Singoaren.

### 3.3. Outcomes

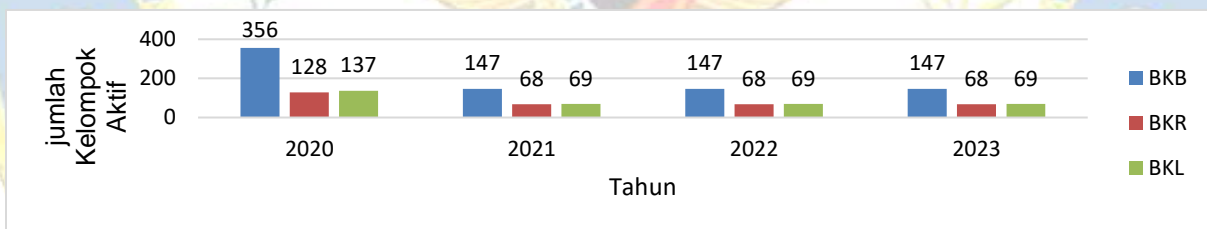
Outcomes yaitu suatu pelaksanaan program berdampak nyata pada target/sasaran. Dalam hal ini yaitu dampak nyata dari program Kampung KB di Kecamatan Banguntapan. Menurut Nurcholis (2007) ada 3 indikator yaitu :

- Ada tidaknya perubahan pada target
- Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
- Seberapa signifikan perubahan

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu ketua kampung KB. Ibu atik sebagai ketua Kampung KB Potorono menyatakan bahwa ada perubahan dengan adanya program kampung KB ini. Kampung KB ini memberi dampak perubahan pada masyarakat. Masyarakat menjadi terstimulus untuk membentuk UKM karena sering adanya pelatihan melalui UPPKA, munculnya produk-produk baru, kegiatan di masyarakat semakin tertata baik secara administrasi dan susunan kegiatan, masyarakat merasa lebih diperhatikan dengan begitu menjadi mudah untuk dikoordinir, lingkungan lebih bersih karena ada pengelolaan sampah dan timbul kesadaran masyarakat. Selain itu, para akseptor KB menjadi lebih mudah diberikan edukasi yang terfasilitasi melalui KIE sehingga tidak perlu lagi dilakukan dari rumah ke rumah.

Jika dilihat dari seberapa besar dan signifikan perubahan kelompok sasaran, Indikator ini berkaitan dengan tingkat perubahan dari tahun ke tahun. Semakin signifikan perubahan atau semakin tinggi tingkat perubahan yang menuju ke arah positif pada kelompok sasaran maka semakin bagus juga program tersebut berjalan.

**Gambar 3.2 Progres Kelompok Tribina**

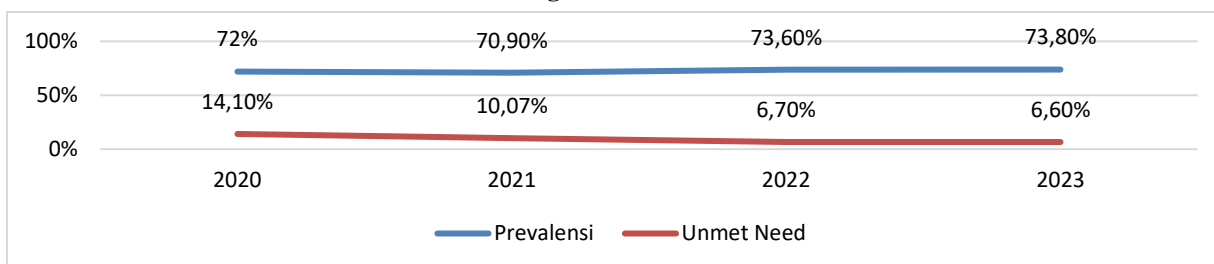


sumber : laporan bulanan pengendalian tingkat desa kecamatan banguntapan 2020-2023 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan grafik diatas, terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 ke 2021. Jumlah kelompok aktif BKB turun dari yang sebelumnya 356 kelompok menjadi 147 kelompok kemudian stagnan hingga tahun 2023. Tidak jauh beda dengan BKB, BKR juga mengalami penurunan dari tahun 2020. BKR yang sebelumnya sejumlah 128 turun menjadi 68 kelompok kemudian tidak ada kenaikan ataupun penurunan hingga tahun 2023. Kelompok aktif BKL juga demikian. Dari 137 kelompok pada tahun 2020 turun menjadi sejumlah 69 kelompok dan stagnan hingga tahun 2023.



**Gambar 3.3 Progres Prevalensi dan Unmet Need**



sumber : laporan bulanan pengendalian tingkat desa kecamatan banguntapan 2020-2023 (diolah oleh peneliti)

Prevalensi menunjukkan perbandingan atau persentase antara peserta KB aktif dengan pasangan usia subur. Semakin tinggi angka prevalensi artinya semakin banyak pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB. Berdasarkan grafik diatas, progres prevalensi mengalami kenaikan. Hal ini menandakan program program keluarga berencana berjalan cukup baik. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan 1,1% dari tahun sebelumnya, akan tetapi grafik menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai tingkat prevalensi tertinggi selama 4 tahun terakhir yaitu 73,8%.

Berbeda dengan prevalensi, Unmet Need menunjukkan persentase pasangan usia subur yang tidak menerima pelayanan KB. Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak pula pasangan usia subur yang tidak terlayani. Dalam hal ini BKKBN menetapkan angka Unmet Need nasional sebesar 7,40%. Pada awal tahun 2020, terlihat pada grafik bahwa kecamatan banguntapan melampaui ambang batas nasional yaitu 14,10% kemudian turun hingga menurun 4,3% hingga menjadi 10,7% pada tahun 2021. Meskipun menurun akan tetapi pada tahun 2021 masih melampaui ambang batas nasional hingga dapat memenuhi target nasional pada tahun 2022 yaitu mencapai 6,7%. Angka ini terus menurun hingga tahun 2023 dapat mencapai 6,60%.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis mendapatkan bebrapa temuan dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan yangmana menjadikan pembeda dengan penelitian sebelumnya. Faktor pendukung dari dari segi pendanaan yaitu adanya inisiatif dari masyarakat untuk menyumbangkan dana. Selain itu swadaya masyarakat juga berjalan untuk mendorong kegiatan dari segi pendanaan. Sebagian kelurahan yang menganggarkan dana untuk kegiatan Kampung KB, contohnya di Kelurahan Potorono yang merupakan Kampung KB terbaik di Kecamatan Banguntapan “kalo disini, karna kegiatan rutin dan sering jadi juara tingkat kabupaten, jadinya Kelurahan juga mau ngasih anggaran dana ketika ada proposal kegiatan”, Ucap Ibu atik ketua Kampung KB Potorono ketika diwawancarai. Faktor pendukung dari segi pendanaan lainnya yaitu ada beberapa Industri ataupun perusahaan yang memberikan CSR, sponsorship, sumbangan, ataupun bekerjasama dengan kampung KB. Dari segi sumberdaya manusia memiliki faktor pendukung berupa kader. Para Kader kampung KB bekerja secara sukarela tanpa adanya honor atau gaji. Dilain sisi anggaran untuk gaji para kader juga tidak ada, oleh karena itu, kesediaan kader untuk sukarela membantu program pemerintah merupakan faktor pendukung yang pokok. Selain dari kader, ada faktor pendukung berupa PLKB yang bekerja dilapangan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Selain itu, peningkatan kapasitas para kader juga dilakukan oleh PLKB. Dengan adanya PLKB ini maka Kampung KB bisa berjalan secara teratur dan tertib segi administrasi. Faktor pendukung yang tidak kalah penting yaitu partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan. Tujuan pokok program Kampung KB adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting.

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan antara lain dari segi pendanaan yaitu dana yang kurang mencukupi untuk melakukan kegiatan di kampung KB. Ibu Asih menyampaikan, “Dari segi dana, kurang mencukupi untuk kegiatan harian jika hanya mengandalkan BOKB ataupun dana dari APBD. Dana lebih baru diberikan ketika ada lomba. BOKB hanya mencukupi untuk kegiatan beberapa kali pertemuan saja dalam hal konsumsi dan transport, kalau untuk fasilitasi masih rendah”. Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Bowo selaku staf analis pengendalian Penduduk bahwa, “Desa kalau tanpa modal kita akui agak susah. Swadaya masyarakat desa juga tidak bisa dijadikan andalan karena ada beberapa desa dengan pekerjaan masyarakatnya yang secara pemasukan masih kurang. Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka untuk memberikan swadaya”. Tidak semua kampung KB juga memiliki koneksi dengan CSR atau perusahaan yang mau memberikan suntikan dana. Terutama Kampung KB yang terletak di desa terpencil mengalami kesulitan untuk mendapatkan CSR. Dalam hal Sumberdaya manusia, kendalanya yaitu kesanggupan dari kader untuk mau bergerak, mencari relasi dan berinovasi atau mengembangkan program yang sudah ada. Kapasitas dan kemampuan kader yang masih terbatas menjadi hambatan.

Selain itu, Ibu asih menyampaikan “Keterlibatan peran bapak dalam kegiatan Kampung KB masih kurang maksimal karena kesulitan dalam hal waktu untuk menghadirkan bapak bapak yang tentu saja bebarengan dengan jam kerja. Pada intinya Keterlibatan bapak belum maksimal karena punya tanggungjawab kerja.” Sama halnya dengan remaja yang kurang maksimal karena memiliki kegiatan padat misalnya sekolah, kuliah atau ada yang sudah bekerja sehingga kesulitan mencari waktu yang senggang. Dari segi kuantitas kader juga masih kurang sehingga banyak kader yang merangkap bagian pekerjaan. Kesulitan membagi waktu juga menjadi hambatan bagi kader padahal menjadi kader dalam hal ini tumpuan berjalannya program kegiatan. selain itu, regenerasi kader masih sulit untuk dilaksanakan. Faktanya, banyak kader yang sudah tua karna susah untuk regenerasi ataupun mencari kader selanjutnya.

#### **IV. KESIMPULAN (5-10%)**

Penulis menyimpulkan bahwa Hasil evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan indikator Input, Proses, Output, dan Outcomes menunjukkan bahwa program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum secara maksimal. Penulis mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan pada dimensi Output Hal ini terlihat dari grafik prevalensi yang menunjukkan kecenderungan naik, namun masih ada beberapa Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani program keluarga berencana. Selain itu adanya ketimpangan angka Unmet Need antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya. Jika dilihat dari Program Tribina, maka masih jauh dari maksimal, karena mengalami penurunan jumlah anggota yang aktif dan sampai saat ini masih stagnan tidak ada peningkatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Seluruh civitas pegawai Kecamatan Banguntapan, PLKB, Kepala Kampung KB yang telah menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. Dinas

DP3AP2KB Bantul yang telah menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad., 2022. Efektivitas Pembentukan Kampung Kb Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Susukan. Skripsi. Jatinangor: IPDN <http://eprints.ipdn.ac.id/11466/>
- Ariani, Desi. 2018. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Medan : <http://repositori.usu.ac.id/>
- Andhiki, Syahra Sonia dkk., 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Kampung Kb Kabupaten Studi Kasus Kecamatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada  
<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JMPK/article/view/4256>
- Dewi, DM. (2016) Banyak Anak Banyak Rejeki” Vs “Dua Anak Cukup” Via Program Kb Di Kota Batam. Journal Of Law And Policy Transformation, 1(1).  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/41/17>
- Febrian, D., 2022. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Jatinangor: IPDN
- Gatiningsih, & E, S. (2017). *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku%20GATI%20dan%20EKO%20Kependudukan%20LENGKA%20P.pdf>
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta.  
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/934/>
- Ma'ruf, & Andayani. (2022). *Modul Keluarga Berkualitas*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB. <https://online.anyflip.com/uokzw/kjqu/mobile/>
- Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Grasindo. Jakarta
- Purba, Alfariz., 2023. Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Jatinangor: IPDN  
<http://eprints.ipdn.ac.id/12359/>
- Resnawaty, R., 2021. Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Jatinangor. Universitas Padjajaran <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/32142>
- Saputra, Romi & L.M Effendi. 2019. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana dalam Pengendalian Angka Kelahiran di Kabupaten Karawang. Jakarta : <http://eprints.ipdn.ac.id/>
- Tatuhe, S., Laloma, A., & Pesoth, W. (2016). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud). Jurnal Administrasi Publik, 1(37).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/12038>
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar., 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT, ” Bumi Aksara.
- Zultha, Nurhafifah., 2017. *Implementasi program Kampung KB dalam upaya penanggulangan KEMISKINAN (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: Lampung University Press  
<http://digilib.unila.ac.id/29770/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>